BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan di masyarakat banyak terjadi kejadian-kejadian atau perbuatan yang di alami oleh manusia yang setiap perbuatan atau kejadian tersebut harus di pertanggung jawabkan sebagai mana mestinya. Dan setiap kejadian atau perbuatan manusia tidak luput dari ada yang merugikan orang lain ada pula yang menguntungkan orang lain dan ada pula yang dianggap biasa biasa saja. Kita manusia merupakan makhluk sosial dan tidak bisa bertindak sesuka hati dan ada norma norma tertentu yang membatasi dan mengatur setiap perbuata manusia yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar tercipta kehidupan yang adil, rukun damai dan tenteram.

Di era modern ini proses globalisasi membawa dampak di seluruh sektor kehidupan masyarakat, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi juga pola dan jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kejahatan tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan pembangunan. Bahkan ada seorang pakar mengatakan bahwa kejahatan adalah produk masyarakat dan produk

pembangunan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan baik individu maupun masyarakat.¹

Oleh karena itu, aparat dan segenap pihak yang berwenang harus mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat. Biasanya suatu tindak pidana sulit untuk di ungkapkan karena pelaku berusaha untuk tidak meninggalkan jejak sidik jari ataupun tanda bukti yang akan memberatkannya. Hal ini dilakukan untuk lepas dari jeratan hukum dan menghilangkan tanda bukti agar dapat mengelabui tim penyidik.

Pembuktian merupakan hal yang paling menentukan dan paling penting dalam pembuktian di persidangan, karena pembuktian menentukan kehidupan seseorang. “Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku.”² Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi

¹Abdussalam dan adri desasfuryanto.*Sistem peradilan pidana.*(Jakarta: PTIK. 2012) hlm 1

²Bambang waluyo.*Sistem pembuktian dalam peradilan Indonesia.*(Jakarta:sinar grafika.1991).hlm 3

manusia dipertaruhkan. Sejarah perkembangan Hukum Acara Pidana menunjukkan bahwa sistem dan teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem dan pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat.³

Di lihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkapkan suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara. Tujuan Hukum Acara Pidana dapat dibaca pada Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang diterbitkan oleh Menteri Kehakiman adalah sebagai berikut:

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan hukum pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan, selanjutnya meminta dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu

³Andi hamzah. *Hukum acara pidana Indonesia*.(Jakarta: sinar grafika. 2008) hlm 248.

dapat di persalahkan pada tahap persidangan perkara tersebut.⁴

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Perkembangan ini membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Berkembangnya alat-alat telekomunikasi, elektronik, dan telematika. Semua teknologi tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia sekarang. Perkembangannya seakan memaksa masyarakat untuk selalu siap menerima dan mengikutinya.

Penggunaan sistem dan alat elektronik telah menciptakan suatu cara pandang baru dalam menyikapi perkembangan teknologi. Perubahan paradigma dari *paper based* menjadi *electronic based*. Dalam perkembangannya, *electronic based* semakin diakui keefisienannya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan, maupun dalam bentuk penyimpanan.⁵ Sehingga dalam dunia hukum juga tidak lepas dari pengaruh peran

⁴ *Ibid*, hlm 7-8

⁵ Dana fitriana, ‘‘ *Rekaman Video Sebagai Alat Buktitindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*’’,(skripsi UIN sunan kalijaga Yogyakarta,2013).hlm1

teknologi dan informasi yang semakin berkembang. Dan menuntut hukum untuk menjadi lebih teliti dalam menyikapi setiap hal yang baru yang mempengaruhinya.

Untuk mencari kebenaran dan kejelasan dari suatu peristiwa atau perbuatan pidana yang telah terjadi, selain menggunakan ilmu hukum diperlukan juga bantuan dari disiplin ilmu lain, antara lain ilmu kedokteran kehakiman dan juga multimedia. Misalnya kasus perampokan yang sering terjadi di sebuah minimarket, atau kasus tindak pidana yang tidak diketahui kejadiannya secara persis dan detail. Dalam kasus yang sedang heboh sekarang yaitu kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumalawongso dalam hal kasus ini alat bukti dengan *Closed Circuit Television* (selanjutnya di tulis dengan) CCTV diperdebatkan. Hal tersebut membutuhkan bantuan alat bukti lain yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dan menjadi salah satu alat bukti selain pengakuan dari saksi untuk mengungkap tindak pidana yang bertujuan pada nilai-nilai keadilan.

“CCTV adalah sebuah kamera video digital yang difungsikan untuk memantau dan mengirim sinyal video pada suatu ruang yang kemudian sinyal itu akan diteruskan kedalam sebuah layar monitor”⁶.

Dalam pembuktian CCTV berfungsi sebagai alat bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan untuk menjadi petunjuk dan mengungkap tindak pidana di pengadilan. Alat bukti yang berupa CCTV tersebut untuk sementara waktu disimpan di bawah penguasaan pejabat yang berwenang untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan.⁷

Dalam Hukum Positif pada Pasal 184 mengatur alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Keterangan alat bukti tertulis
4. Petunjuk

⁶Sisilain.Net. *Pengertian dan fungsi kamera CCTV*. <http://www.sisilain.net/2011.02/pengertian-dan-fungsi-kamera-CCTVHTML> Diakses 26 desember 2016 pukul 13:40 WIB.

⁷ Khafif Sirojuddin, “ *problematikan closed circuit television (CCTV) Sebagai alat bukti menurut pasal 184 KUHAP dan dalam hukum islam*”,(skripsiUIN sunan kalijaga Yogyakarta,,2012). Hlm4

5. Keterangan terdakwa⁸

Dalam Hukum Positif dengan menggunakan pendekatan pada Pasal 184 di atas, alat bukti yang berupa CCTV Merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan petunjuk dan keterangan saksi ahli. Namun, apabila dianalogikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, informasi atau dokumen elektronik dapat diakui sebagai petunjuk. Analisa ini disampaikan oleh ahli hukum pidana dari Universitas Brawijaya, Masruchin Ruba'i di persidangan kasus pembunuhan Mirna di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2016).⁹

Menurut R. Atang Ranomiharjo, bahwa alat bukti yang sah adalah alat alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah di lakukan terdakwa.¹⁰

Dalam Hukum Islam tidak diterangkan secara jelas mengenai pembuktian dengan rekaman menggunakan CCTV yang melibatkan saksi ahli, padahal dengan adanya pemeriksaan dengan saksi ahli tersebut dapat mengungkap tindak pidana yang

⁸KUHP dan KUHP.

⁹<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/09/22/ahli-hukum-pidana-sebut-cctv-hanya-jadi-petunjuk>. Diakses kamis 03 november 2016 pukul 08:53

¹⁰Andi sofyan dan asis.*Hukum acara pidana suatu pengantar* (Makassar: kencana. 2014) hlm. 231

terjadi. Bahkan Abdullah Ahmed An-Naim sebagaimana mengutip pendapat Abdu Al-qadir' Audah menyatakan bahwa:

*“Aturan-aturan pembuktian dalam hukum pidana islam mengandung diskriminasi, seperti dengan ditolaknya perempuan dan non muslim padahal mereka berkompeten untuk menjadi saksi dalam beberapa kasus”.*¹¹

Dan juga dalam surah al-hujarat Ayat 6 :

يَا هَآءِ أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepada mu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesalali perbuatanmu itu.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis kemudian tertarik untuk meneliti tentang **STUDI KOMPARATIF KEDUDUKAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM.**

Berdasarkan Kasus yang terjadi pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh terdakwa Jesika Kumala Wongso di kedai kopi es Vietnam di Olifier Cafe dan perampokan maut di SPBU

¹¹ Khafif Sirojuddin, *op. cit.* hlm5

Daan Mogot KM 12 Cengkareng Timur, Jakarta Barat dan perkelahian yang menyebabkan luka di sebuah parkir Domain Club di Tanah Abang Jakarta dan “kasus pencurian seng sebanyak 5000 keping di PT. Bangun Baru Jaya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Palembang Pada 28 September 2016 oleh pelaku Joni dan Mungana”¹² yang penyelesaian perkara menggunakan alat bukti pokok CCTV.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan CCTV sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana menurut Hukum Positif?
2. Bagaimanakah kedudukan CCTV sebagai Alat Bukti dalam pembuktian Tindak Pidana menurut Hukum Islam?

¹² Andi jaya. *Pencuri Seng Terekam Kamera Cctv*. Palembang.tribunnews.com/2016/10/12/pencuri-seng-terekam-cctv. Diakses Minggu, 29 November 2017 pukul 20:17

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan CCTV sebagai Alat Bukti dalam pembuktian Tindak Pidana menurut Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui kedudukan CCTV sebagai Alat Bukti dalam pembuktian Tindak Pidana menurut Hukum Islam.

Penelitian tentang Pembuktian menggunakan Alat Bukti CCTV dalam pandangan Hukum Islam dan Positif ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana dan hukum Islam mengenai pembuktian dengan menggunakan alat bukti CCTV.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus pidana dengan perkara yang menggunakan alat bukti CCTV, sehingga Keadilan dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, baik bagi para praktisi negara dan agama maupun masyarakat umum.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, penulis berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah dan karya tulis yang serupa penelitian dan berkaitan dengan pembahasan. Namun dari berbagai karya yang telah ada belum ditemukan pembahasan yang secara terkhusus membahas tentang penerapan alat bukti menggunakan CCTV Dalam pembuktian hukum pidana. Baik itu dalam Hukum Islam ataupun dalam Hukum Positif tentang pidana diindonesia.

Mukhlis dalam skripsinya *Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Hukum Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia)*¹³. Yang membahas tentang media media elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti spesifiknya membahas tentang banyaknya kasus kasus kriminal yang terjadi di media online seperti penipuan dalam jual beli dan saling hujat di media massa.

Dana fitriana, "*Rekaman Video sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*"¹⁴. Ini membahas tentang status kekuatan video dalam pembuktian tindak pidana perzinahan sedangkan penulis akan lebih membahas ke pembuktian umum dalam pembuktian hukum pidana.

Khafif Sirojuddin, "Problematikan CCTV sebagai Alat Bukti menurut Pasal 184 KUHP dan dalam Hukum Islam",. Ini membahas tentang penggunaan CCTV dalam pembuktian

¹³ Mukhlis'' *kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum pidana perspektif hukum islam dan hukum pidana Indonesia*(skripsi UIN Sunan Kalijaga: 2011)

¹⁴ dana fitriana, "*rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana perzinaan perspektif hukum islam dan hukum positif*"(skripsi sunan kalijaga Yogyakarta:2013)

berdasarkan Hukum Islam dan KUHAP sedangkan pembahasan skripsi ini lebih luas kepada Hukum Pidana Indonesia dan Islam.

Tabel I:

Tabel perbedaan pembahasan penelitian terdahulu dan yang akan di bahas dalam skripsi ini:

No	Nama, NIM, Judul skripsi dan tahun dan lembaga	Pokok pembahasan terdahulu	Pokok pembahsan yang ditelit
1	Mukhlis (07360013) ‘ <i>Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum pidana (perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia) tahun 2011</i> Sunan Kalijaga. Yogyakarta	Penelitian ini di proyeksikan untuk mengetahui bagaimana kedudukan alat bukti elektronik yang masih bersifat umum dalam pembuktian hukum islam dan hukum pidana Indonesia	Pembahsan sekarang mengkhusus kan kepada pembahsan tentang kedudukan penggunaa cctv sebagai alat bukti dalam pembuktian dengan perbandingan kepada hukum pidan Indonesia dan dibandingkan dengan hukum islam

2	<p>Dana Fitriana (08360033) <i>Rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana perzinahan perspektif hukum islam dan hukum positif</i>) tahun 2013 Sunan Kalijaga. Yogyakarta</p>	<p>Pembahasan ini mengkhususkan tentang status kedudukan video dalam pembuktian tindak pidana perzinahan.</p>	
3	<p>Khafif Sirojuddin (05370010) <i>Problematika closed circuit television (CCTV) sebagai alat Bukti Menurut Pasal 184 Kuhap dan Hukum Islam.</i> Sunan Kalijaga. Yogyakarta</p>	<p>Penelitian ini lebih terkhusus kepada pasal 184 KUHAP yang membahas tentang pembuktian dan kemudian dibandingkan kepada hukum islam</p>	

Sejauh ini beberapa karya di atas, belum ada yang membahas secara komprehensif dan secara terkhusus mengenai pembuktian menggunakan CCTV sebagai alat buktinya.baik itu

dari tinjauan Hukum Islam maupun Hukum Pidana Indonesia yang akan penulis bahas dalam pembahasan pada skripsi ini.

E. Metode penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Dalam melakukan penelitian ini demi mencapai hasil yang valid, yaitu untuk menjawab persoalan yang penyusun teliti, maka dari itu dibutuhkan langkah-langkah kerja penelitian. Adapun metode yang penyusun pakai dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang akan dibahas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, data-data yang di paparkan, di interprestasikan dan di analisis

yaitu penelitian yang mencoba memberi gambaran dan kejelasan mengenai tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pembuktian dengan menggunakan CCTV.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud. Oleh karena itu sumber data akan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Sumber primer: Al-Qur'an dan Hadits, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
- b. Sumber sekunder: Buku-buku yang ada kaitannya dengan pembuktian menggunakan CCTV, diantaranya: buku-buku Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan hukum Positif .Kemudian juga diambil dari

majalah, koran dan media lain yang menyinggung tentang masalah pembuktian dan CCTV.

c. Sumber tersier: kamus ilmiah dan kamus besar Indonesia serta majalah, koran ataupun media massa yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan dibahas

4. Metode Analisis Data

Selanjutnya data-data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif, yaitu memperhatikan dan mencermati data mendalam dengan menggunakan metode induktif yaitu menjelaskan berangkat dari fakta-fakta yang khusus peristiwa yang nyata yang kemudian mempunyai sifat umum dan deduktif yaitu membentuk pengetahuan umum yang kemudian akan dijadikan kesimpulan yang khusus¹⁵ untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu tinjauan hukum Islam dan positif terhadap pembuktian dengan CCTV.

¹⁵ Beni ahmad saebani. Metode penelitian. Pustaka setia, bandung, 2008. Hlm. 70

5. Pendekatan penelitian

Sesuai pokok masalah pembahasan skripsi ini, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan normatif yaitu cara pendekatan masalah yang melihat apakah yang diteliti tersebut sesuai atau tidak berdasarkan norma agama yang berlaku dan juga kontekstualisasinya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberi kemudahan bagi pembaca maka penulis mencoba menguraikannya secara sistematis yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pembahasan dalam skripsi ini yang diawali dengan pendahuluan yang menguraikan seputar argumentasi tentang signifikansi dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan

pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka berpijak untuk melangkah ke pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab kedua, karena penelitian ini membahas tentang pembuktian, maka bab ini membahas tentang pembuktian dalam hukum pidana Indonesia dan hukum islam, yang mencakup pembahasan mengenai pengertian, jenis, fungsi dan kegunaan alat bukti baik itu dalam hukum islam dan hukum pidana Indonesia. Pengertian CCTV dan macam-macam CCTV.

Bab ketiga, berisi jawaban dari pokok pokok permasalahan yang berkaitan dengan Studi Komparatif Kedudukan CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam yaitu kedudukan alat bukti CCTV dalam pandangan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam.

Kemudian Bab Keempat, sebagai bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penyusun di akhir penelitian.